

BAB 5

KESIMPULAN

Kebijakan luar negeri Indonesia pasca Kudeta 2021 dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo berkesinambungan dengan politik luar negeri Indonesia yang ‘Bebas-Aktif’, dimana dalam implementasinya arah kebijakan luar negeri Indonesia tampak realistis dan juga pragmatis. Dimana “bebas” dimaksudkan bahwa dalam membuat kebijakan luar negerinya, Indonesia mengambil sikap independen tanpa bergantung pada pihak manapun, sedangkan “aktif” diinterpretasikan dalam bentuk partisipasi Indonesia dalam perdamaian di Myanmar. Hal ini dapat dilihat dengan bagaimana Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan seperti memberikan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi serta memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Indonesia juga mendukung kebijakan untuk melarang perwakilan junta militer Myanmar menghadiri KTT dan pertemuan tingkat menteri ASEAN karena sikap tidak kooperatifnya dalam melaksanakan *Five Point Consensus* yang telah diputuskan ASEAN, hal ini jugalah yang mendorong Pemerintahan Indonesia untuk tidak menghadiri pertemuan informal yang digagas Thailand mengenai persoalan Myanmar.

Kebijakan luar negeri Indonesia juga mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya kepentingan nasional yang berbeda. Dimana pada awalnya Indonesia memiliki sikap inklusif dalam memberikan bantuan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya yang mengalami kejahatan kemanusiaan secara sistematis. Indonesia juga menawarkan diri bahwa dia siap berbicara, baik Junta Militer dan para pemangku kepentingan yang ada di Myanmar untuk kepentingan Kemanusiaan. Tetapi dengan semakin signifikannya beban yang ditimbulkan dengan menerima para pengungsi, yang memengaruhi kepentingan nasional dari sosial-ekonomi-keamanan, membuat Indonesia berupaya mendorong negara ketiga untuk menerima pengungsi dan mendorong agar para pengungsi bisa di kembalikan kenegara asalnya dimana Pemerintah menyampaikan argument ini dengan merujuk pada status Indonesia yang tidak berpartisipasi dalam meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, serta kekhawatiran

mengenai stabilitas regional serta keamanan nasional demi kepentingan nasional Indonesia.

Arah kebijakan luar negeri Indonesia itu sendiri cenderung menggunakan instrumen damai yakni diplomasi dan propaganda, dan instrumen ekonomi, tetapi Indonesia tidak memberikan sanksi atau tekanan ekonomi kepada Myanmar tetapi menggunakan keterlibatan ekonomi seperti bantuan kemanusiaan sebagai pintu masuk untuk memulai dialog, mencegah eskalasi konflik dan pengungsi serta mencegah mengisolasi Myanmar. Indonesia tidak menggunakan instrumen intervensi dan persenjataan, peran dan pengaruh politik, hal ini dikarenakan bertentangan dengan prinsip dasar ASEAN dan tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia yang mengedepankan stabilitas dan perdamaian. Kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari Menlu Myanmar U Winna Maung Lwin pada 24 Februari 2021 dalam upaya Indonesia dalam berdialog. Kemudian bagaimana Presiden Joko Widodo menyatakan kekecewaannya atas tidak adanya progress yang signifikan dari pengimplementasi dari *Five Point Consensus*. Ini dapat dihitung sebagai upaya propaganda yang lebih halus untuk mendorong Junta Militer untuk mengembalikan kepemimpinan ke pihak sipil yang sejauh ini tidak berhasil, atau untuk membuat Junta Militer setidaknya mewujudkan *Five Point Consensus*. Presiden Joko Widodo juga menyatakan penolakannya terhadap pengungsi Rohingya pada tahun 2023 dikarenakan adanya keterlibatan pengungsi Rohingya dengan TPPU yang membuat para pengungsi dianggap sebagai ancaman dan membuat interaksi sosial antara Indonesia dengan para pengungsi Rohingya tidak lagi terbatas sesama muslim ataupun simpati kemanusiaan tetapi ada sentiment negatif karena dianggap berinteraksi dengan entitas yang berpotensi mengancam ketertiban negara dan merugikan Indonesia baik untuk masyarakat Aceh ataupun negara. Fenomena ini membuat Indonesia memiliki legitimasi yang di setuju oleh masyarakat untuk mengubah Kebijakan Luar Negeri Indonesia untuk menolak pengungsi Rohingya lebih banyak lagi dan mendorong pengembalian para pengungsi. Kebijakan luar negeri Indonesia bergeser menjadi menjaga keseimbangan antara solidaritas kemanusiaan dan menjaga stabilitas keamanan nasional dengan memberikan respon resmi yang selektif dan bersifat kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia membingkainya dalam konteks diplomasi non-intervensi menggunakan ungkapan “bantuan kemanusiaan sementara”, menghormati kedaulatan Myanmar, dan diperlukannya dialog regional.